

7-2015

Apakah Jenjang Pendidikan Dasar Tenaga Kerja Berperan dalam Mengurangi Kemiskinan di Indonesia?

Rofiq Nur Rizal

Sekolah Tinggi Ilmu Statistik – Badan Pusat Statistik, rofiq@stis.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jepi>



Part of the [Economics Commons](#)

Recommended Citation

Rizal, Rofiq Nur (2015) "Apakah Jenjang Pendidikan Dasar Tenaga Kerja Berperan dalam Mengurangi Kemiskinan di Indonesia?," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*: Vol. 16: No. 1, Article 2.

DOI: 10.21002/jepi.v16i1.02

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jepi/vol16/iss1/2>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Economics & Business at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Apakah Jenjang Pendidikan Dasar Tenaga Kerja Berperan dalam Mengurangi Kemiskinan di Indonesia?

Is Basic Education Level of Labor have a role in Reducing Poverty in Indonesia?

Rofiq Nur Rizal^{a,*}

^aSekolah Tinggi Ilmu Statistik – Badan Pusat Statistik

[diterima: 13 Oktober 2015 — disetujui: 2 Juni 2016 — terbit daring: 31 Oktober 2016]

Abstract

Improving the quality of human resources through education is believed as one of the solutions to reduce poverty. World attention to education in global 'Education For All program' and the 'Millennium Development Goals', suggests that basic education become central program in reducing poverty. If there was a linear relationship between education and income, improved education at basic level would not increase revenues substantially. This study aim is analyzing the role of labor education level toward poverty. Using panel data, this study found that basic education level of labor has a significant role to increase poverty, whereas higher education levels of labor significantly reduce poverty in Indonesia.

Keywords: Labor Education; Poverty; Indonesia; Panel Data

Abstrak

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan diyakini sebagai salah satu solusi untuk mengurangi kemiskinan. Kepedulian dunia internasional terhadap pendidikan dalam gerakan global 'Pendidikan Untuk Semua' dan 'Tujuan Pembangunan Milenium', menegaskan bahwa pendidikan dasar menjadi pusat untuk mengurangi kemiskinan. Ketika terdapat hubungan linier antara pendidikan dan pendapatan, maka meningkatkan pendidikan hanya pada tingkat pendidikan dasar tidak akan meningkatkan pendapatan secara substansial. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran jenjang pendidikan tenaga kerja terhadap kemiskinan. Menggunakan data panel, studi ini menunjukkan bahwa secara signifikan jenjang pendidikan dasar tenaga kerja berperan meningkatkan kemiskinan, sedangkan tenaga kerja dengan jenjang pendidikan lebih tinggi signifikan mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Kata kunci: Pendidikan Tenaga Kerja; Kemiskinan; Indonesia; Data Panel

Kode Klasifikasi JEL: H5; I2; I3

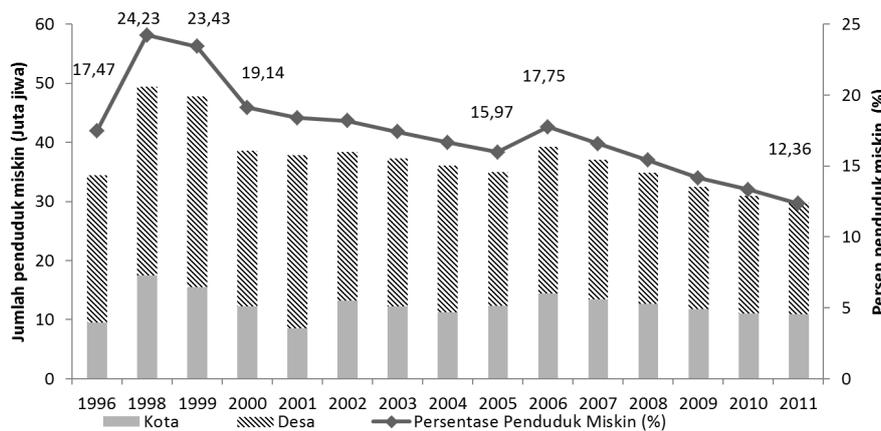
Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan keragaman besar dalam wilayah, ekonomi, dan sosial-budaya, masih menghadapi banyak tantangan dalam mengurangi kemiskinan. Kemiskinan sebagai salah satu permasalahan pembangunan yang dialami setiap negara, merupakan masalah multidimensi yang dapat berhubungan dengan sejumlah faktor ekonomi, fisik, psikologi, maupun sosial budaya. Tidak ada penyebab tunggal yang dapat menjelaskan sepeuhnya, sehingga mengurangi kemiskinan memerlukan

solusi secara menyeluruh dan berkelanjutan dari waktu ke waktu.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia melalui program pengentasan kemiskinan, tetapi belum mencapai hasil yang diharapkan. Sasaran Pembangunan Nasional 2000–2004, menargetkan tingkat kemiskinan sekitar 14% pada tahun 2004. Kenyataannya, tingkat kemiskinan di tahun 2004 sebesar 16,66% (Bappenas, 2004). Kemudian, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005–2009 menargetkan tingkat kemiskinan menjadi 8,2% pada akhir periode. Namun, tingkat kemiskinan di tahun 2009 masih tinggi, yaitu 14,15% (Bappenas, 2010a). Selanjutnya, dalam RPJMN 2010–2014 menargetkan tingkat

* Alamat Korespondensi: Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta Timur, 13330. E-mail: rofiq@stis.ac.id; rofiq@bps.go.id.



Gambar 1: Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia, Tahun 1996–2011

Sumber: *Statistik Indonesia, 2000–2011* (publikasi BPS), diolah

kemiskinan hingga 8–10% pada tahun 2014. Akan tetapi, sampai dengan tahun 2011 masih sebesar 12,49% (30,02 juta jiwa), berkisar dari 3,2% di DKI Jakarta hingga 31,98% di Papua (Bappenas, 2010b).

Tilak (1989) meneliti mengenai hubungan antara pendidikan dan kemiskinan, dengan menunjukkan diagram plot dan hasil analisis regresi sederhana antara rata-rata lama sekolah dengan persentase penduduk miskin. Tilak menyimpulkan bahwa ketika partisipasi pendidikan meningkat, maka proporsi penduduk miskin mengalami penurunan. Di sisi lain, beberapa peneliti telah menganalisis peran pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi berdasarkan tingkat pendidikan dan melaporkan hasil yang beragam, di antaranya Colclough (1982) serta Drèze dan Saran (1993) yang memfokuskan lebih eksklusif pada pendidikan dasar. *World Bank* (1995) juga menetapkan bahwa pengembalian investasi pendidikan dasar lebih tinggi daripada pengembalian investasi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, sehingga berkesimpulan bahwa pendidikan dasar dan melek huruf sebagai agenda untuk pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, maupun pembangunan manusia.

Pendidikan merupakan salah satu instrumen paling kuat yang dimiliki masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan. Secara langsung, peran pendidikan adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan, sehingga meningkatkan produktivitas dan menciptakan akses ke lapangan kerja. Dengan demikian, penghasilan yang didapat akan dapat digunakan dalam membantu mengurangi kemiskinan, serta kelaparan. Secara tidak langsung,

peran pendidikan dapat mencakup banyak bidang kehidupan, termasuk kegiatan ekonomi, kesetaraan gender, kesehatan ibu, dan pengembangan keterampilan (Weiss, 1995; Oxaal, 1997). Pendidikan dapat membantu meningkatkan pendapatan potensial, memperluas mobilitas tenaga kerja, meningkatkan kesehatan orang tua dan anak-anak, mengurangi kesuburan dan kematian anak, serta mengupayakan suara rakyat yang kurang beruntung dalam masyarakat dan sistem politik (Klugman, 2002). Pendidikan dipercaya mempunyai peran penting dalam membentuk kemampuan manusia dan suatu negara untuk menyerap maupun menciptakan teknologi modern, serta mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan (Todaro dan Smith, 2006).

Kepedulian dunia internasional pada pendidikan diwujudkan dalam gerakan global Pendidikan untuk Semua (*PUS/Education for All*) pada tahun 1990 dan *Millennium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2000. Kebijakan PUS menegaskan komitmen masyarakat internasional untuk mengurangi kemiskinan melalui pendidikan (UNESCO, 2000). Selanjutnya, 8 tujuan yang tertuang dalam kesepakatan MDGs yang ditargetkan tercapai pada tahun 2015, yaitu: (1) menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; (2) mencapai pendidikan dasar untuk semua; (3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (4) menurunkan angka kematian anak; (5) meningkatkan kesehatan ibu; (6) memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya; (7) memastikan kelestarian lingkungan hidup; dan (8) mengembangkan kemitraan global untuk pem-

bangunan; di antaranya terkait dengan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, kesehatan, dan lingkungan hidup, menganggap bahwa penyelesaian pendidikan dasar, bersama dengan pencapaian MDGs lainnya, akan membantu mewujudkan tujuan mengurangi separuh jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan pada tahun 2015. Hal ini dipahami bahwa tingkat pendidikan dasar adalah tingkat anak-anak keluarga miskin dapat lulus, dan diharapkan prestasi mereka dapat membantu untuk memutus siklus kemiskinan (UNESCO, 2001). Tujuan PUS juga untuk berkontribusi terhadap upaya global dari delapan tujuan MDG, terutama MDG-1, MDG-2 dan MDG-3 untuk menanggulangi kemiskinan melalui pendidikan dasar dan kesetaraan gender.

Terkait dengan kepedulian dunia internasional dalam bidang pendidikan, pemerintah Indonesia telah berkomitmen pada kedua tujuan tersebut melalui Program Wajib Belajar (Program Wajar). Program Wajar telah menjadi prioritas kebijakan nasional pemerintah Indonesia sejak awal periode 1970-an, dimulai dengan meningkatkan pembangunan sarana pendidikan dasar¹. Pada tahun 1983, Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Wajar 6 Tahun untuk anak usia 7–12 tahun secara nasional². Kemudian dilanjutkan dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun pada 1994³, yang ditargetkan bisa tercapai pada tahun 2003/2004, meskipun akhirnya tidak dapat tercapai tepat waktu karena adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada 1997 (Bappenas, 2009).

Setelah terjadinya krisis ekonomi, perhatian pemerintah terhadap upaya penanggulangan kemiskinan semakin besar. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan program-program pengentasan kemiskinannya. Pada RPJMN 2005–2009 dengan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK), terdapat tiga klaster program penanggulangan kemiskinan⁴.

¹Sebagai persiapan pelaksanaan wajib belajar, dilaksanakan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 10 Tahun 1973.

²Inpres No. 7 Tahun 1983 Tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1983/1984.

³Inpres Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

⁴Klaster I – Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga; Klaster II – Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat; dan Klaster III – Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil.

Salah satu klasternya adalah bantuan sosial terpadu berbasis keluarga dan di antaranya terkait dengan pendidikan⁵, berupa: Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM), program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan program Beras Miskin (raskin) (Bappenas, 2010a). Program-program SNPK tersebut juga dilanjutkan pada RPJMN 2010–2014 (Kemkominfo, 2011).

Terkait dengan masalah kemiskinan, jika terdapat hubungan linier antara tingkat pendidikan dan pendapatan yang diperoleh, maka peningkatan pendidikan yang hanya pada tingkat pendidikan dasar diduga tidak akan meningkatkan pendapatan secara substansial dan tentunya tidak akan efektif dalam mengatasi kemiskinan. Dalam kerangka MDGs, ada keraguan bahwa tujuan MDG-1 (menanggulangi kemiskinan dan kelaparan) tidak akan efektif tercapai jika hanya melalui tujuan MDG-2 (universalisasi pendidikan dasar). Secara khusus, kebijakan nasional pada bidang pendidikan dalam konteks penanggulangan kemiskinan di Indonesia, yang terkait dengan kebijakan nasional program Wajar Dikdas 9 tahun, diduga tidak cukup untuk mengangkat masyarakat miskin keluar dari kemiskinan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenjang pendidikan manakah yang berperan dalam pengurangan kemiskinan di Indonesia.

Pada penelitian-penelitian sebelumnya, para peneliti lebih banyak menggunakan indikator-indikator bidang pendidikan seperti: angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan tingkat partisipasi sekolah sebagai proksi variabel pendidikan. Penelitian ini akan menggunakan variabel tingkat partisipasi angkatan kerja menurut tingkat pendidikan yang dianggap lebih baik dalam menjelaskan tingkat kemiskinan yang terkait erat dengan tingkat pendapatan pekerja (atau rumah tangga). Alasannya adalah hubungan antara pendidikan dan kemiskinan dapat diterjemahkan melalui jalur ketenagakerjaan. Pendidikan dapat memberikan

⁵Program Wajar Dikdas sebelum amandemen keempat UUD 1945 pada tahun 2002, belum menyediakan pembiayaan pendidikan. Selanjutnya, ditetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2003 (tentang Sistem Pendidikan Nasional) yang sekaligus mengganti dan menyempurnakan UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Dalam rangka melaksanakan ketentuan UU Sisdiknas, ditetapkan Inpres Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara; dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

pengetahuan dan keterampilan, sehingga meningkatkan produktivitas dan menciptakan akses lapangan kerja. Orang-orang yang berpendidikan memiliki potensi penghasilan lebih tinggi dan lebih mampu meningkatkan kualitas hidup, yang berarti kecil kemungkinan untuk terasingkan dalam komunitas atau masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan terkait erat dengan tingkat pendidikan tenaga kerja, karena tingkat pendidikan berhubungan juga dengan tingkat pendapatan pekerja.

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui jenjang pendidikan yang berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia. Setelah kurang lebih tiga dasawarsa pelaksanaan program Wajar Dikdas – mulai dari Wajar 6 tahun hingga Wajar 9 tahun – dan adanya rencana pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional untuk mengusulkan rintisan program Wajar 12 tahun⁶⁷, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bagian pertimbangan pemerintah Indonesia dalam kebijakan pemerataan pendidikan untuk semua dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Tinjauan Literatur

Tinjauan Teoritis

Teori Modal Manusia

Penelitian mengenai peran pendidikan diprakarsai oleh Schultz (1960, 1961) dan Becker (1962). Schultz membahas tentang investasi sumber daya manusia (SDM) dan menetapkan bahwa pendidikan sebagai kegiatan konsumsi dan investasi yang mengarah pada pembentukan modal manusia –sebanding dengan modal fisik– yang akan diikuti pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Penelitian Becker mendasari dalam meyakinkan orang untuk membuat pilihan investasi dalam modal manusia dengan menimbang biaya dan manfaat rasional yang mencakup pengembalian investasi pendidikan.

⁶Kemdiknas Siapkan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. 12 Oktober 2011. <http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2011/10/kemdiknas-siapkan-rintisan-wajib-belajar-12-tahun-17-17-17> [diakses pada 5 Juli 2012].

⁷Kemdikbud-Komisi X DPR RI Siapkan Rintisan Wajar 12 Tahun. 06 Februari 2012. <http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2012/02/kemdikbud-komisi-x-dpr-ri-siapkan-rintisan-wajar-12-tahun--119-119-119> [diakses pada 5 Juli 2012].

Teori Signaling dan Screening

Sehubungan dengan pendidikan dan pasar kerja, Spence (1973) menganalisis pasar dengan informasi asimetrik mengenai *signaling* dalam pasar kerja. Teori tersebut menjelaskan hubungan antara pendidikan dan pendapatan. *Signaling* adalah strategi untuk menghindari beberapa masalah yang terkait dengan seleksi yang merugikan, mengacu pada tindakan yang dapat diamati dan dilakukan oleh satu pihak (disebut agen) untuk menyampaikan beberapa informasi tentang dirinya sendiri kepada pihak lain (pengusaha) tentang kualitas mereka.

Spence menggunakan pendidikan sebagai contoh *signaling*. Sertifikat pendidikan dapat digunakan sebagai sinyal untuk menunjukkan tingkat kemampuan tertentu yang dimiliki individu. Umumnya, pengusaha bersedia membayar upah lebih tinggi untuk mempekerjakan pekerja dengan kemampuan atau pendidikan lebih tinggi, karena lebih murah dan mudah bagi perusahaan untuk melatih karyawan berkemampuan tinggi daripada karyawan dengan kemampuan rendah.

Di sisi lain, Stiglitz (1973) juga menganalisis pasar dengan informasi asimetrik dan menunjukkan bahwa agen yang kurang informasi kadang dapat menangkap informasi dari agen yang mempunyai informasi lebih baik melalui *screening*. Dalam model *screening*, diasumsikan bahwa perusahaan memilih tingkat pendidikan terkait dengan tugas dan upah yang akan diberikan. Pendidikan dapat digunakan sebagai *screening device* untuk mengidentifikasi produktivitas SDM yang telah terbentuk sebelumnya dan membedakan tingkat upah di antara kelompok SDM yang berbeda pendidikannya.

Teori Pertumbuhan Endogen

Romer (1986, 1990, 1994) dan Lucas (1988) menyatakan bahwa investasi dalam modal manusia serta inovasi dan pengetahuan merupakan kontributor yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan endogen berfokus pada eksternalitas positif dan efek *spillover* ekonomi berbasis pengetahuan yang akan mengarah pada pembangunan ekonomi. Selanjutnya, konsep pendidikan sebagai sebuah investasi berkembang secara pesat dan semakin diyakini oleh setiap negara bahwa pembangunan sektor pendidikan merupakan prasyarat kunci bagi pertumbuhan sektor-sektor pembangunan lainnya.

Tinjauan Empiris

Chaudhry *et al.* (2010) mengevaluasi efek dari berbagai tingkat pendidikan dan melek huruf pada insiden kemiskinan di Pakistan dengan menggunakan data *time series* selama 35 tahun (1972–2007) dengan variabel kunci: kemiskinan absolut (P_0); angka melek huruf; serta tingkat partisipasi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengentasan kemiskinan akan dapat dipercepat jika sumber daya ditargetkan pada sektor pendidikan, khususnya dalam pendidikan tinggi.

Awan *et al.* (2011) mengevaluasi efek dari berbagai tingkat pendidikan, pengalaman dari individu-individu yang bekerja menurut jenis kelamin sebagai variabel penjelas, dan individu miskin sebagai variabel terikat dalam penentu kemiskinan di Pakistan pada tahun 1998–1999 dan 2001–2002. Dengan model regresi logistik, hasilnya menunjukkan bahwa pengalaman dan tingkat pendidikan berhubungan negatif dengan kemiskinan pada dua periode tersebut. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka probabilitas menjadi miskin semakin berkurang.

Kiani (2011) melakukan penelitian untuk mencoba mengembangkan hubungan antara tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi dan seberapa jauh dapat membantu dalam mengurangi kemiskinan di Pakistan selama tahun 1980–2007. Data yang digunakan adalah (Produk Domestik Bruto) PDB riil dan persentase kemiskinan sebagai variabel terikat dan rasio lulusan siswa menurut tingkat pendidikan terhadap total angkatan kerja yang bekerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebagai variabel bebas. Semua variabel menggunakan nilai logaritma natural dan menggunakan data dua tahun tertinggal (*lag*) pada variabel pendidikan karena membutuhkan waktu dalam penerapan kebijakan atau strategi pendidikan serta untuk mendapatkan pekerjaan, yang disebut periode implementasi. Dengan menggunakan metode persamaan regresi sederhana, hasilnya menyimpulkan bahwa pertumbuhan PDB riil berhubungan positif dengan rasio lulusan siswa pendidikan dasar terhadap total angkatan kerja yang bekerja. Tetapi pendidikan tinggi tidak memainkan peran signifikan secara independen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

Janjua dan Kamal (2011) melakukan penelitian dengan tujuan utama untuk menyelidiki apakah

penduduk berpendidikan formal suatu negara memiliki dampak besar terhadap besarnya kemiskinan, serta variabel lain seperti pendapatan per kapita dan kesenjangan pendapatan. Menggunakan data panel dari 40 negara berkembang tahun 1999–2007 dengan variabel terikat adalah persentase penduduk miskin dan variabel bebas adalah pertumbuhan pendapatan per kapita, ketimpangan pendapatan (indeks Gini), dan angka partisipasi murni pendidikan menengah. Hasil perkiraan koefisien dengan menerapkan efek acak teknik *General Least Square* (GLS). Penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, pertumbuhan pendapatan per kapita memainkan peran cukup positif dalam mengurangi kemiskinan, tetapi distribusi pendapatan tidak memainkan peran kunci dalam penanggulangan kemiskinan dalam sampel secara keseluruhan. *Kedua*, pendidikan merupakan penyumbang yang paling signifikan untuk pengentasan kemiskinan. Pada penelitian-penelitian tersebut, variabel-variabel bebas yang digunakan pada umumnya menggunakan data pendidikan yang bersifat lebih "makro", antara lain: angka melek huruf, tingkat partisipasi pendidikan, pengalaman bekerja, tingkat pendidikan, rasio lulusan siswa menurut tingkat pendidikan terhadap total angkatan kerja yang bekerja, dan TPAK, serta variabel lain seperti pendapatan per kapita dan kesenjangan pendapatan. Adapun metode-metode yang digunakan antara lain menggunakan analisis data *time series*, regresi logistik, regresi sederhana, maupun regresi data panel.

Secara umum, penelitian ini menggunakan variabel-variabel yang telah digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Namun demikian, penelitian ini juga menggunakan variabel tingkat partisipasi angkatan kerja menurut tingkat pendidikan yang belum digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena dunia pendidikan berhubungan dengan dunia kerja, maka penelitian ini menggunakan data tingkat kesempatan kerja menurut pendidikan, yang dianggap lebih baik dalam menjelaskan tingkat kemiskinan yang memang terkait erat dengan tingkat pendapatan pekerja. Adapun metode yang digunakan yakni dengan analisis data panel. Menurut Baltagi (2005), penggunaan data panel memberikan banyak keuntungan di antaranya sebagai berikut: (1) mampu mengontrol heterogenitas individu; (2) memberikan data yang lebih banyak dan beragam, mengurangi kolinearitas antar-peubah, meningkatkan derajat bebas, dan lebih efisien; serta (3) lebih baik untuk penelitian *dynamics of adjustment*, karena observasi

cross section yang berulang, maka data panel lebih baik dalam mempelajari perubahan dinamis. Indonesia sebagai negara dengan keragaman besar dalam wilayah, sosial, budaya, dan ekonomi, maka dianggap memiliki heterogenitas individu.

Kerangka Pemikiran

Pada Gambar 2, hubungan antara pendidikan dan kemiskinan dapat dijelaskan melalui teori modal manusia yang menunjukkan bahwa ketika individu berinvestasi dalam pendidikan, akan membuat diri individu tersebut lebih produktif dalam pasar tenaga kerja, dan pada gilirannya dapat membawa individu tersebut untuk memiliki penghasilan yang lebih tinggi. Namun demikian, terdapat perbedaan kemampuan masyarakat dalam hal keputusan berinvestasi dalam pendidikan. Masyarakat yang tidak mampu secara finansial (masyarakat miskin) akan sulit mengakses pendidikan ke setiap jenjang pendidikan karena keterbatasan pendapatan. Masyarakat miskin juga mengalami kendala kredit karena ketiadaan aset yang bisa dijadikan sebagai jaminan ketika mencoba untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal.

Implikasi dari teori modal manusia pada kebijakan pemerintah yang dihasilkan adalah perlunya intervensi pemerintah dalam alokasi sumber daya pada pendidikan. Pendidikan sebagai salah satu barang publik, harus disediakan oleh pemerintah selama manfaat keseluruhan untuk konsumen setidaknya sama besar dengan biaya penyediaannya.

Kemudian, bahwa dunia pendidikan erat kaitannya dengan lapangan pekerjaan, permintaan terhadap pendidikan merupakan permintaan tidak langsung terhadap kesempatan memperoleh pekerjaan berpenghasilan tinggi di sektor modern. Penyebabnya adalah untuk memperoleh pekerjaan di sektor modern sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Dalam kerangka teori modal manusia dan teori *signalling-screening* (teori pemilahan), pendapatan akan dibayar sesuai dengan produktivitas marginal tenaga kerja. Kedua teori tersebut mengaitkan bahwa pendidikan yang lebih tinggi dengan produktivitas yang lebih tinggi, akan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi bagi para individu. Implikasi pada kegiatan pemilahan adalah fenomena pengutamaan ijazah atau sertifikasi pendidikan.

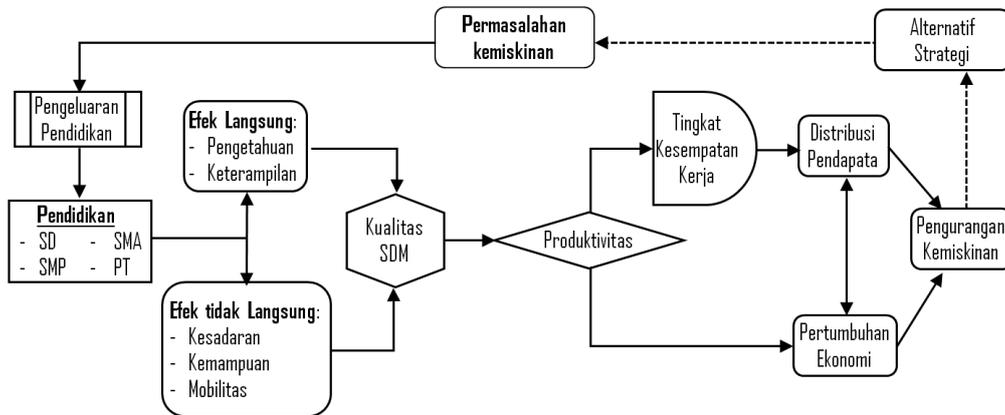
Namun demikian, orang-orang dengan berbagai macam alasan –kebanyakan karena kemiskinan mereka– tidak dapat melanjutkan pendidikan, akan

berada dalam golongan orang-orang putus sekolah atau tidak berpendidikan. Pada akhirnya, akan sulit mendapatkan pekerjaan di sektor formal karena tidak memiliki sertifikasi pendidikan formal. Oleh karena itu, untuk meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan, maka diperlukan intervensi pemerintah dalam penyediaan layanan dan pembiayaan pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin. Masyarakat miskin benar-benar membutuhkan lebih banyak pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta juga membutuhkan suatu konteks ekonomi, yaitu mereka dapat menyadari keuntungan ekonomi dari peningkatan modal manusia mereka.

Selanjutnya, dalam kerangka teori pertumbuhan endogen, akumulasi modal manusia merupakan kontributor penting bagi pertumbuhan ekonomi. Teori ini berfokus pada eksternalitas positif dan efek *spillover* ekonomi berbasis pengetahuan, yang akan mengarah pada pembangunan ekonomi dan pertumbuhan sektor-sektor pembangunan lainnya, sehingga pada akhirnya mempunyai peran terhadap pengurangan kemiskinan. Di sisi lain, adanya kesenjangan pada modal manusia juga akan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi (Castelló, 2004). Selanjutnya, Bourguignon (2004) menjelaskan bahwa perubahan kemiskinan dapat diuraikan melalui pertumbuhan ekonomi dan redistribusi pendapatan.

Hubungan ketiga teori tersebut adalah teori modal manusia yang menyediakan dan menciptakan kualitas modal manusia, sedangkan teori pemilahan akan memilah tenaga kerja berpendidikan dengan produktivitas lebih baik yang akan memasuki dunia kerja dan menggantikan kelompok tua yang tidak produktif lagi, sehingga akumulasi modal manusia produktif akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Implikasi dari ketiga teori tersebut adalah pentingnya investasi pada modal manusia melalui pendidikan maupun pelatihan, salah satunya melalui kebijakan Wajar.

Berdasarkan teori modal manusia, kebijakan Wajar secara langsung memengaruhi orang-orang yang terkendala dalam partisipasi pendidikan, sehingga akan meningkatkan tingkat partisipasi pendidikan. Sementara berdasarkan hipotesis pemilahan pendidikan, kebijakan Wajar secara tidak langsung akan meningkatkan pencapaian pendidikan bagi pekerja berkemampuan tinggi. Implikasi teori pertumbuhan endogen adalah bahwa setiap investasi dalam pendidikan akan menghasilkan perbaikan yang terus-menerus dan berkelanjutan terhadap perubahan teknis dan pertumbuhan ekonomi yang



Gambar 2: Kerangka Pemikiran Penelitian
Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

didorong faktor inovasi.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: (1) jenjang pendidikan dasar diduga tidak berperan efektif dalam mengurangi kemiskinan; dan (2) besarnya kontribusi setiap jenjang pendidikan terhadap kemiskinan, diduga berbeda-beda. Semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin tinggi pula pengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Metode

Data dan Cakupan Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu persentase penduduk miskin, jumlah tenaga kerja menurut tingkat pendidikan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan indeks Gini mencakup 33 provinsi di Indonesia periode tahun 2007–2010.

Metode Analisis dan Spesifikasi Model

Untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu menganalisis jenjang pendidikan yang berkontribusi besar dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia, maka digunakan metode regresi data panel. Data panel adalah struktur data yang memiliki dimensi ruang (individu) dan waktu. Dalam data panel, data *cross section* yang sama diamati dari waktu ke waktu. Ada dua model dalam data panel, *Random Effect Model* (REM) dan *Fixed Effect Model* (FEM) yang

dipilih berdasarkan hasil uji Hausman.

Untuk mengidentifikasi peran jenjang pendidikan terhadap kemiskinan, digunakan pendekatan tingkat kesempatan kerja. Tingkat kesempatan kerja menurut tingkat pendidikan didefinisikan sebagai rasio penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut tingkat pendidikan terhadap jumlah total angkatan kerja. Indikator ini menunjukkan populasi yang memiliki potensi ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa yang nyata sesuai dengan tingkat pendidikan. Persamaan ini juga melibatkan variabel PDRB per kapita dan indeks Gini untuk menghitung efek tidak langsung pendidikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Persamaan model yang digunakan dalam penelitian ini adalah modifikasi dari model Tilak (1989), Kiani (2011), serta Janjua dan Kamal (2011), sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 (\text{Miskin})_{i,t} = & c_0 + c_1(\text{Dasar})_{i,t} \\
 & + c_2(\text{Menengah})_{i,t} \\
 & + c_3(\text{Tinggi})_{i,t} \\
 & + c_4 \ln(\text{PDRBKap})_{i,t} \\
 & + c_5(\text{Gini})_{i,t} + u_{i,t}
 \end{aligned} \tag{1}$$

dengan:

- (**Miskin**)_{*i,t*} : Persentase penduduk miskin di provinsi ke-*i* pada tahun ke-*t*;
- (**Dasar**)_{*i,t*} : Rasio tenaga kerja berpendidikan dasar (SD, SMP) terhadap total angkatan kerja di provinsi ke-*i* pada tahun ke-*t*;
- (**Menengah**)_{*i,t*} : Rasio tenaga kerja pendidikan menengah (SMU, SMK) terhadap total angkatan

kerja di provinsi ke- i pada tahun ke- t ;
(Tinggi) $_{i,t}$: Rasio tenaga kerja pendidikan tinggi (Diploma I/II/III, Strata 1/2/3) terhadap total angkatan kerja di provinsi ke- i pada tahun ke- t ;
(PDRBKap) $_{i,t}$: PDRB per kapita di provinsi ke- i pada tahun ke- t (juta Rp);
(Gini) $_{i,t}$: Indeks Gini di provinsi ke- i pada tahun ke- t ;
 c_0 : intersep;
 c_i : Parameter yang diestimasi, $i = 1, \dots, k$;
 $u_{i,t}$: eror.

Hasil dan Analisis

Analisis Deskriptif

Gambar 3 memperlihatkan *scatter-plot* antara tingkat kesempatan kerja menurut tingkat pendidikan terhadap persentase penduduk miskin di Indonesia periode tahun 2007–2010. Berdasarkan plot data untuk lulusan SD dan SMP, terjadi hubungan positif. Artinya, bahwa semakin tinggi tingkat kesempatan kerja lulusan SD dan SMP, maka tingkat kemiskinan di Indonesia akan semakin besar. Selanjutnya, berdasarkan plot data untuk jenjang pendidikan menengah, terjadi hubungan negatif. Artinya, semakin tinggi tingkat kesempatan kerja lulusan SMU dan SMK, maka tingkat kemiskinan di Indonesia akan semakin turun. Demikian pula halnya dengan plot data untuk jenjang pendidikan tinggi, terjadi hubungan negatif. Artinya, semakin tinggi tingkat kesempatan kerja lulusan diploma dan strata, maka tingkat kemiskinan akan semakin turun.

Analisis Hasil Estimasi Model Peran Pendidikan Tenaga Kerja terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa FEM lebih baik dibandingkan dengan REM. Terlihat dari nilai peluang statistik Hausman pada Tabel 1, yang lebih kecil dari 5% yaitu sebesar 1,72%, yang memiliki arti bahwa data pengamatan belum cukup bukti untuk menolak hipotesis nol, bahwa tidak ada korelasi antara komponen eror dengan peubah bebas.

Berdasarkan hasil estimasi Tabel 2, ditemukan adanya heteroskedastisitas pada model, terlihat dari jumlah kuadrat sisaan (*sum square residual*) pada

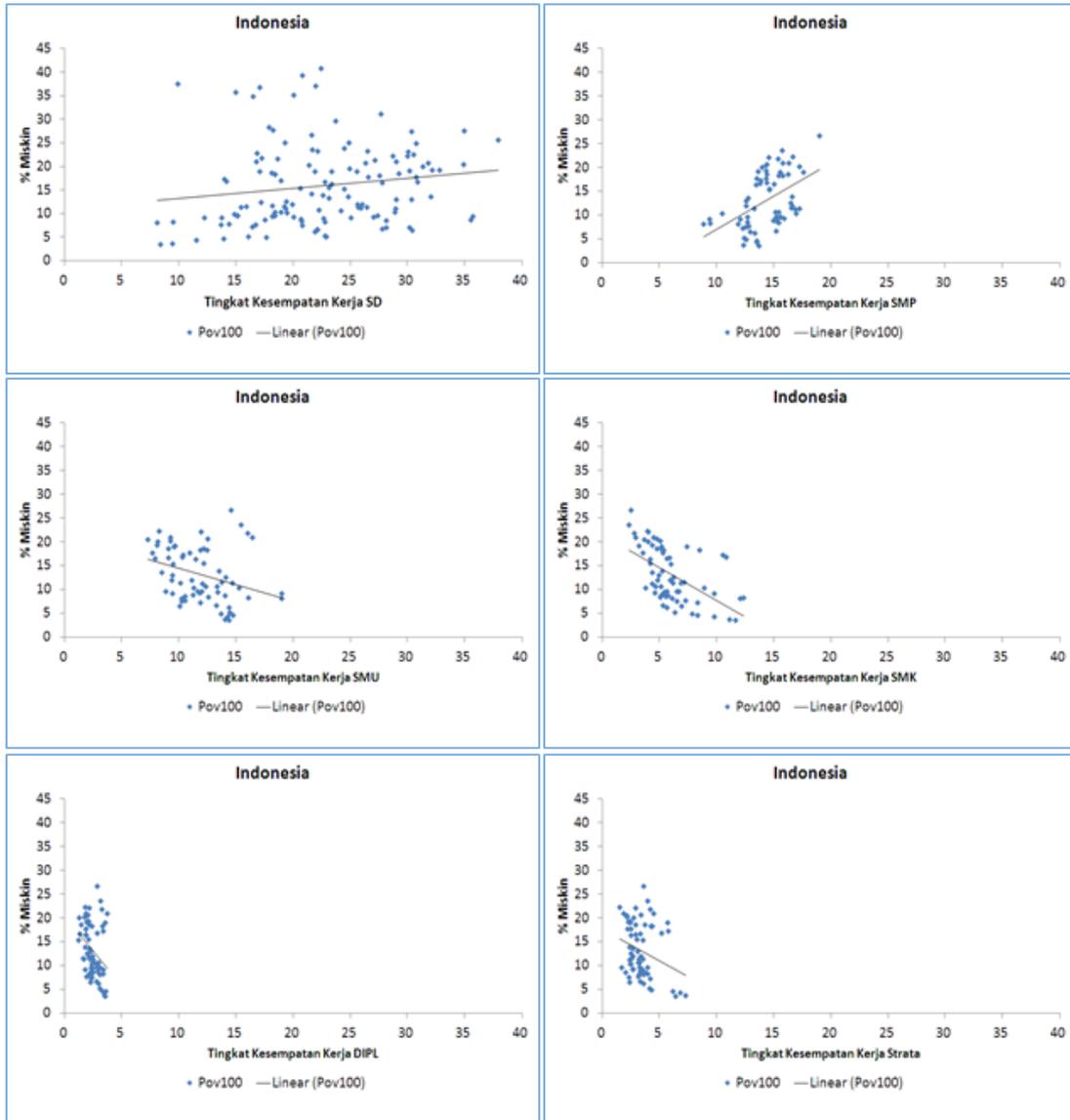
weighted statistics lebih kecil daripada *unweighted statistics*. Berdasarkan hasil uji statistik Durbin-Watson (DW), diperoleh nilai DW_{hitung} pada *unweighted statistics* terletak di antara nilai $4-dU$ dan $4-dL$. Hasil ini menandakan tidak dapat ditentukan korelasi pada model tersebut, sehingga estimasi perlu dilakukan menggunakan metode *fixed effect* GLS dengan *cross-section weights* dan *seemingly unrelated regressions* (SUR) untuk mengatasi kedua pelanggaran asumsi tersebut (Greene, 2003).

Tabel 3 menyajikan hasil estimasi model peran pendidikan tenaga kerja terhadap kemiskinan di Indonesia. Melalui angka *R-squared* sebesar 0,9969, dapat dinyatakan bahwa variasi naik turunnya tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 99,69%, yang disebabkan oleh variasi naik turunnya variabel-variabel bebas tersebut. Sisanya sebesar 0,31% diakibatkan faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model, namun ditampung dalam variabel gangguan acak. Secara serentak, terlihat pula bahwa model yang diestimasi sangat signifikan pada taraf 1%, atau dengan besaran nilai peluang statistik uji F $p\text{-value} = 0,0000$.

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kesempatan kerja lulusan jenjang pendidikan dasar mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini berarti bahwa kesempatan kerja bagi lulusan pendidikan dasar belum mampu untuk mengurangi kemiskinan, tetapi cenderung dapat menambah tingkat kemiskinan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Awan *et al.* (2011) yang menyimpulkan bahwa probabilitas menjadi miskin semakin berkurang jika tingkat pendidikan semakin tinggi. Begitu juga dengan penelitian Chaudhry *et al.* (2010) yang menyimpulkan bahwa proses pengentasan kemiskinan akan dapat dipercepat jika sumber daya ditargetkan pada sektor pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Wedgwood (2007) menyimpulkan bahwa pengalaman negara Tanzania dalam kebijakan pemerataan pendidikan dengan perluasan pendidikan dasar, menunjukkan bahwa pendidikan dasar tidak selalu mengarah pada pengurangan kemiskinan. Ketika lulusan pendidikan dasar memasuki pasar tenaga kerja, mereka sering tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan dan cenderung kalah dengan orang yang lebih berpendidikan.

Menurut data BPS (2009a), karakteristik rumah tangga miskin menurut tingkat pendidikan tertinggi kepala rumah tangga (KRT) menunjukkan bahwa persentase KRT miskin yang tidak tamat SD/tamat



Gambar 3: Scatter-Plot antara Tingkat Kesempatan Kerja menurut Jenjang Pendidikan terhadap Persentase Penduduk Miskin di Indonesia, Tahun 2007–2010
 Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Tabel 1: Hasil Pengujian Antara FEM dengan REM (Uji Hausman) untuk Model Peran Jenjang Pendidikan Tenaga Kerja terhadap Kemiskinan di Indonesia, Tahun 2007–2010

Correlated Random Effects - Hausman Test
 Equation: INA
 Test cross-section random effects

| Test Summary | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob. |
|----------------------|-------------------|--------------|--------|
| Cross-section random | 13,764064 | 5 | 0,0172 |

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Tabel 2: Uji Asumsi Homoskedastisitas dan Autokorelasi Model Peran Jenjang Pendidikan Tenaga Kerja terhadap Kemiskinan di Indonesia, Tahun 2007-2010

| Identifikasi | Indonesia |
|---|-----------|
| Homoskedastisitas | |
| <i>Sum squared resid</i> | |
| <i>Unweighted Statistics</i> | 0,0063 |
| <i>Weighted Statistics</i> | 0,0053 |
| SSR _w < SSRU _w → Terdapat heteroskedastisitas | |
| Autokorelasi | |
| α | 5% |
| k | 5 |
| N | 132 |
| dL | 1,6380 |
| dU | 1,7950 |
| DW | 2,0939 |
| 4-dU < DW < 4-dL → Tidak dapat ditentukan | |

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Tabel 3: Hasil Estimasi Model Peran Jenjang Pendidikan Tenaga Kerja terhadap Kemiskinan di Indonesia, Tahun 2007–2010

| Variabel Bebas | Variabel Terikat: | |
|---------------------------|---|-----------------------|
| | Persentase penduduk miskin(POV100) Koefisien | Probabilita (p-value) |
| C | 1,0004 | 0,0000*** |
| Dasar | 0,1526 | 0,0000*** |
| Menengah | -0,1767 | 0,0508** |
| Tinggi | -0,2693 | 0,0039*** |
| <i>Log(YCap)</i> | -0,0538 | 0,0003*** |
| Gini | -0,0197 | 0,5609 |
| <i>R-squared</i> | 0,9969 | |
| <i>Adjusted R-squared</i> | 0,9957 | |
| <i>Prob (F-statistic)</i> | 0,0000 | |

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Keterangan: ** signifikan pada taraf 5%

*** signifikan pada taraf 1%

SD dan SMP lebih tinggi dibanding persentase KRT miskin dengan tingkat pendidikan terakhir SMA atau perguruan tinggi. Lebih lanjut menurut data BPS (2009b), 90,65% KRT miskin yang bekerja adalah berpendidikan dasar ke bawah. Indikasi ini menunjukkan bahwa mereka yang tergolong miskin cenderung berpendidikan rendah. Lebih lanjut berdasarkan data BPS (2011), penyerapan tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh tenaga kerja lulusan SD dan SMP dengan rata-rata upah/gaji bersih pekerja/karyawan selama sebulan menurut pendidikan SD dan SMP yang berkisar antara Rp750.000–Rp1.120.000. Fenomena ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian Indonesia masih mengandalkan tenaga kerja murah. Rendahnya tingkat pendapatan pekerja SD dan SMP akan berpeluang meningkatkan kemiskinan. Hal ini berarti bahwa kesempatan kerja bagi lulusan pendidikan dasar belum mampu untuk mengurangi kemiskinan, tetapi cenderung dapat menambah tingkat kemiskinan.

Berdasarkan hasil penelitian, mulai dari jenjang pendidikan tingkat menengah ternyata lebih berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari permintaan tenaga kerja berpendidikan menengah ke atas yang cenderung meningkat selama beberapa tahun terakhir. Kuantitas dan kualitas pekerja terampil dan berpengetahuan tinggi akan berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan. Pekerja yang memiliki keterampilan tinggi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita melalui peningkatan produktivitas, sehingga dapat berperan dalam mengurangi kemiskinan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tilak (2005) yang menyatakan bahwa pendidikan menengah dan tinggi di India lebih meningkatkan pendapatan individu dan lebih berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, sehingga berkontribusi signifikan terhadap pengurangan kemiskinan di India. Hal ini mendukung penelitian Khan dan Williams (2006) yang menyatakan bahwa pendidikan tinggi sangat penting untuk pengentasan kemiskinan karena berperan sebagai pelengkap pendidikan dasar dan menengah –dengan pendidikan tinggi akan menyediakan guru-guru terlatih, pengembangan kurikulum yang relevan secara lokal, serta melengkapi pendidikan SDM dengan manajemen yang solid dan keterampilan pemerintahan. Pendidikan tinggi menyediakan keahlian mendasar untuk semua sektor masyarakat dan ekonomi. Namun, berbeda dengan hasil penelitian Kiani (2011)

yang menyimpulkan bahwa pendidikan tinggi di Pakistan tidak memainkan peran signifikan secara independen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

Berdasarkan teori tahapan pembangunan ekonomi, pada tahap awal pembangunan, perekonomian akan didorong oleh faktor produksi yang bersumber pada sumber daya alam berlimpah dan tenaga kerja murah. Pada tahap selanjutnya, perekonomian akan didorong oleh faktor efisiensi yang dipicu oleh investasi yang besar, modern, dan efisien. Tahap berikutnya, perekonomian akan didorong oleh faktor inovasi yang berasal dari produktivitas tenaga kerja terampil dan pemanfaatan teknologi tinggi. Perkembangan perekonomian di Indonesia lambat laun akan menyebabkan pergeseran struktur tenaga kerja. Semakin lama dan tinggi tingkat perekonomian, maka dibutuhkan tenaga kerja dengan kualifikasi lebih tinggi.

Dengan perkembangan perekonomian yang telah terjadi di Indonesia, maka semakin dibutuhkan tenaga kerja terampil. Hal ini akan memperluas tingkat kesempatan kerja bagi tenaga kerja dengan tingkat pendidikan lebih tinggi. Semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan, relatif akan semakin baik keahlian yang dimiliki dan diharapkan akan dapat mengisi lapangan kerja yang menuntut kualifikasi khusus tenaga kerja yang dibutuhkan. Mengingat tuntutan perubahan zaman dan kemajuan teknologi maupun kebutuhan dalam pasar kerja, maka lapangan pekerjaan yang tersedia akan turut berubah, yaitu membutuhkan tenaga kerja terampil dan kemampuan yang bervariasi.

Jika dilihat dari sisi tingkat upah, terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara pekerja berpendidikan dasar (SLTP ke bawah), SLTA, maupun pendidikan tinggi. Pada tahun 2011, rata-rata upah/gaji bersih pekerja berpendidikan SD hanya sebesar Rp758.000/bulan, SLTP sebesar Rp1.120.000/bulan, SLTA sebesar Rp1.445.000/bulan, dan pendidikan tinggi lebih dari Rp2.000.000/bulan (Pusdatinaker, 2012). Dengan demikian, pendapatan yang diperoleh pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi melalui peningkatan produktivitas diharapkan dapat berperan dalam mengurangi kemiskinan.

Selanjutnya, berdasarkan informasi hasil penelitian, peningkatan PDRB per kapita akan berdampak pada penurunan kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Janjua dan Kamal (2011) yang menyatakan bahwa peningkatan PDRB per kapita akan berdampak pada penurunan kemiskinan. Temuan ini sejalan dengan teori

pertumbuhan endogen yang menyatakan modal manusia sebagai sumber pertumbuhan yang penting. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki pekerja serta akan memengaruhi produktivitas melalui cara produksi lebih efisien. Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan peningkatan jumlah lapangan pekerjaan, sehingga akan memperbesar peluang pekerjaan. Oleh karena itu, partisipasi dalam lapangan kerja akan menghasilkan pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan tingkat dan pertumbuhan pendapatan per kapita penduduk secara rata-rata, termasuk peningkatan pendapatan pada kelompok penduduk berpendapatan rendah, meskipun proporsi peningkatannya di bawah rata-rata. Peningkatan pendapatan pada penduduk berpendapatan rendah akan memungkinkan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar, sehingga mampu keluar dari kemiskinan. Dengan demikian, kenaikan pertumbuhan ekonomi (PDRB per kapita) akan memberikan manfaat bagi penduduk untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Berdasarkan data BPS (2007, 2010), pendapatan per kapita secara nasional meningkat dari Rp8,63 juta/tahun di tahun 2007 menjadi Rp9,72 juta/tahun pada tahun 2010, atau terjadi pertumbuhan 4,05% per tahun. Secara kasar, fenomena ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kesejahteraan penduduk. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan pendapatan per kapita.

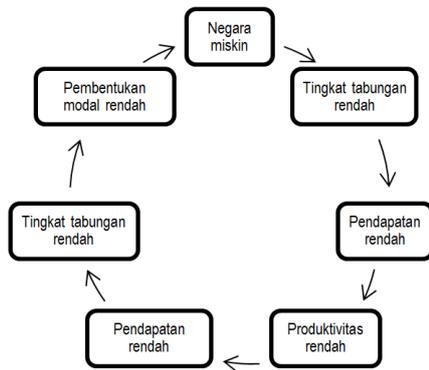
Dalam teori ekonomi pembangunan klasik, Ragnar Nurkse mengemukakan Teori Pertumbuhan Seimbang yang menekankan peran tabungan dan pembentukan modal dalam pembangunan ekonomi, dan berpendapat bahwa negara-negara miskin tetap miskin karena berada dalam lingkaran setan kemiskinan. Teori lingkaran setan kemiskinan dapat digunakan untuk menjelaskannya di tingkat nasional maupun individu. Dalam mengemukakan teori lingkaran setan kemiskinan, Nurkse berpendapat bahwa kemiskinan bukan saja disebabkan oleh ketiadaan pembangunan pada masa lalu, akan tetapi juga menimbulkan hambatan kepada pembangunan di masa yang akan datang (Nurkse (1953) dalam Damanhuri, 2010).

Menurut Nurkse, dua jenis lingkaran kemiskinan yang menghalangi negara-negara berkembang untuk mencapai pertumbuhan yang pesat adalah dari sisi penawaran modal, yaitu rendahnya tingkat tabungan; dan sisi permintaan modal, yaitu terbatasnya pasar, disebabkan oleh rendahnya pen-

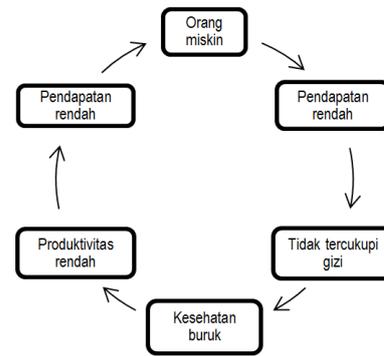
dapatan masyarakat sebagai akibat produktivitas rendah yang diwujudkan oleh pembentukan modal yang terbatas di masa lalu. Menurut Nurkse, faktor terpenting yang menentukan luasnya pasar adalah tingkat produktivitas. Teori lingkaran setan kemiskinan Gunnar Myrdal menyatakan bahwa kemiskinan juga bisa disebabkan karena kurangnya pendidikan, rendahnya gizi dan kesehatan, serta kebutuhan-kebutuhan dasar (*basic needs*) lainnya. Dengan mempelajari kemiskinan pada tingkat individu seseorang, dapat lebih konkret melihat apa yang menyebabkan kemiskinan (Myrdal (1970) dalam Damanhuri, 2010).

Secara garis besar, Gambar 4 menjelaskan hubungan antara pendidikan dan kemiskinan karena adanya efek sirkular, bahwa ketidaksetaraan pendidikan dapat melestarikan kemiskinan antar-generasi, melalui jalur sebagai berikut: (i) sebuah keluarga yang hidup dalam kemiskinan tidak mampu menyekolahkan anaknya ke sekolah; (ii) anak-anak miskin menerima sedikit pendidikan atau tidak sama sekali dan seringkali mereka dipaksa untuk bekerja; (iii) anak-anak tumbuh tanpa keterampilan dasar dan pendidikan; (iv) kurangnya keterampilan dasar dan pendidikan membatasi kesempatan kerja, meskipun dalam pekerjaan dengan upah rendah; (v) pada anak perempuan, akan menikah muda dan memiliki anak; (vi) selanjutnya mereka memiliki sejumlah anak yang ditanggung dengan pendapatan yang sedikit. Demikian seterusnya, lingkaran akan mulai dari awal (i) lagi dan proses ini berjalan dan terus terulang. Di tingkat makro, negara-negara miskin umumnya memiliki tingkat partisipasi pendidikan yang rendah, sehingga pada tingkat mikro pun, anak-anak rumah tangga miskin menerima pendidikan yang kurang.

Terkait dengan penelitian ini, maka untuk mengurangi masalah kemiskinan melalui bidang pendidikan di Indonesia, setidaknya perlu ada intervensi pemerintah dalam kebijakan-kebijakan, antara lain: memfasilitasi penyediaan layanan dan pembiayaan pendidikan, program subsidi bagi masyarakat miskin, dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pembukaan lapangan pekerjaan. Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah sejalan dengan penelitian Prasetyia *et al.* (2011) yang menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang negatif, meskipun belum signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Begitu pula dengan pe-



Gambar 4.a. Lingkaran Setan Kemiskinan Ragnar Nurkse (1953)



Gambar 4.b. Lingkaran Setan Kemiskinan Gunnar Myrdal (1970)

Gambar 4: Lingkaran Setan Kemiskinan
Sumber: Damanhuri (2010)

nelitian Suwardi (2011) yang menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah yang dialokasikan pada bidang pendidikan dan infrastruktur (jalan, irigasi) secara signifikan dapat memengaruhi produktivitas pertanian dan jumlah penduduk miskin. Produktivitas pertanian secara signifikan memiliki hubungan yang negatif dengan jumlah penduduk miskin.

Selanjutnya berdasarkan nilai *cross-section effect* pada Gambar 5, ketika tidak ada perubahan semua variabel, maka rata-rata tingkat kemiskinan di masing-masing provinsi akan sebesar nilai koefisien plus besaran *cross-section effect*-nya. Provinsi Papua Barat, Maluku, Nangroe Aceh Darussalam, dan Papua, akan mengalami kenaikan tingkat kemiskinan tinggi jika tanpa ada usaha peningkatan pendidikan beserta perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan perbaikan distribusi pendapatan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan analisis yang telah disampaikan, dapat ditarik beberapa simpulan. *Pertama*, penelitian ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan dasar tenaga kerja tidak cukup berperan dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia, tetapi justru berperan menambah tingkat kemiskinan. Dengan demikian, kebijakan nasional Wajar Dikdas 9 tahun tidak cukup dalam konteks menanggulangi kemiskinan. Dan *kedua*, penelitian ini menunjukkan

bahwa secara nasional, pendidikan dapat berperan mengurangi kemiskinan apabila jenjang pendidikan tenaga kerja di atas sembilan tahun, yaitu mulai dari jenjang pendidikan menengah ke atas; dan semakin tingginya tingkat pendidikan tenaga kerja, semakin besar pula perannya dalam mengurangi kemiskinan.

Selanjutnya, berdasarkan apa yang telah diuraikan maka saran dan implikasi kebijakan dalam penelitian ini adalah *pertama*, jika pendidikan menjadi salah satu solusi dalam penanggulangan kemiskinan, terkait dengan kebijakan program Wajar dalam konteks penanggulangan kemiskinan, maka Wajar Dikdas 9 tahun sudah perlu ditingkatkan lagi minimal menjadi Wajar 12 tahun ke jenjang pendidikan menengah. *Kedua*, terkait program Wajar 12 tahun, maka perlu penanganan khusus bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan partisipasi pendidikan maupun pencapaian ke jenjang lebih tinggi, seperti program subsidi bagi masyarakat miskin guna menutupi biaya langsung pendidikan dan biaya tidak langsung pendidikan.

Ketiga, pendidikan bisa berperan dalam mengurangi kemiskinan melalui lapangan kerja, sehingga perlu penyediaan dan perluasan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja berpendidikan (tenaga kerja terampil) guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengurangi kemiskinan. *Keempat*, program pembangunan dalam rangka pengentasan kemiskinan hendaknya memperhatikan karakteristik dan efek lintas-daerah. Sebabnya, setiap daerah mempunyai karakteristik yang berbe-

- [10] BPS. (2000). *Statistik Indonesia 2000*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- [11] BPS. (2001). *Statistik Indonesia 2001*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- [12] BPS. (2002a). *Data dan Informasi Kemiskinan tahun 2002*. [Buku 1: Provinsi dan Buku 2: Kabupaten]. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- [13] BPS. (2002b). *Statistik Indonesia 2002*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- [14] BPS. (2003). *Statistik Indonesia 2003*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- [15] BPS. (2004). *Statistik Indonesia 2004*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- [16] BPS. (2005). *Statistik Indonesia 2005*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- [17] BPS. (2006). *Statistik Indonesia 2006*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- [18] BPS. (2007). *Statistik Indonesia 2007*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- [19] BPS. (2008). *Statistik Indonesia 2008*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- [20] BPS. (2009a). *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2009*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Diakses dari <https://www.bps.go.id/website/pdf/publikasi/Analisis-dan-Penghitungan-Tingkat-Kemiskinan-2009.pdf>. Tanggal akses 20 Februari 2012.
- [21] BPS. (2009b). *Analisis Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Distribusi Pendapatan*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Diakses dari <https://www.bps.go.id/website/pdf/publikasi/Analisis-Kemiskinan,-Ketenagakerjaan,-dan-Distribusi-Pendapatan.pdf>. Tanggal akses 20 Februari 2012.
- [22] BPS. (2009c). *Statistik Indonesia 2009*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- [23] BPS. (2010). *Statistik Indonesia 2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- [24] BPS. (2011). *Statistik Indonesia 2011*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- [25] Castelló-Climent, A. (2004). A Reassessment of the Relationship between Inequality and Growth: What Human Capital Inequality Data Say?. *Working papers= Documentos de trabajo: Serie EC (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE))*, [WP-EC 2004-15], 1–33. Madrid: IVIE.
- [26] Colclough, C. (1982). The Impact of Primary Schooling on Economic Development: A Review of the Evidence. *World Development*, 10(3), 167–185.
- [27] Chaudhry, I. S., Malik, S., Hassan, A., & Faridi, M. Z. (2010). Does Education Alleviate Poverty? Empirical Evidence from Pakistan. *International Research Journal of Finance and Economics*, 52, 134–141.
- [28] Damanhuri, D. S. (2010). *Ekonomi Politik dan Pembangunan: Teori, Kritik, dan Solusi bagi Indonesia dan Negara Sedang Berkembang*. Kerja sama IPB Press [dengan] STEI Tazkia.
- [29] Drèze, J., & Saran, M. (1993). Primary Education and Economic Development in China and India: An Overview and Two Case Studies. *Discussion Paper 47*. Development Economics Research Programme (STICERD). London: London School of Economics and Political Science.
- [30] Greene, W. H. (2003). *Econometric Analysis* (5th ed.). New Jersey: Prentice Hall.
- [31] Indonesia, R. (1973). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1973 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar*.
- [32] Indonesia, R. (1983). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1983/1984*.
- [33] Indonesia, R. (1994). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar*.
- [34] Indonesia, R. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- [35] Indonesia, R. (2006). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara*.
- [36] Indonesia, R. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar*.
- [37] Janjua, P. Z., & Kamal, U. A. (2011). The Role of Education and Income in Poverty Alleviation: A Cross-country Analysis. *The Lahore Journal of Economics*, 16(1), 143–172.
- [38] Kemkominfo. (2011). *Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II*. Jakarta: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Diakses dari https://publikasi.kominfo.go.id/bitstream/handle/54323613/68/penanggulangan_KIB-II.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Tanggal akses 10 Februari 2012.
- [39] Khan, H., & Williams, J.B. (2006). Poverty Alleviation Through Access to Education: Can E-Learning Deliver?. *U21Global Working Paper No. 002/2006*. Singapura: U21Global Graduate School.
- [40] Kiani, A. (2011). Role of University Education in Poverty Alleviation in Pakistan. *Interdisciplinary Journal of Research in Business*, 1(7), 30–38.
- [41] Klugman, J. (Ed.). (2002). *A sourcebook for Poverty Reduction Strategies, Volume 2: Macroeconomic and sectoral approaches*. Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank. Diakses dari <http://documents.worldbank.org/curated/en/681651468147315119/pdf/298000v-2.pdf>. Tanggal akses 9 Februari 2012.
- [42] Lucas, R. E. (1988). On the Mechanics of Economic Development. *Journal of monetary economics*, 22(1), 3–42.
- [43] Oxaal, Z. (1997). Education and Poverty: A Gender Analysis. [Report prepared for the Gender Equality Unit, Swedish International Development Cooperation Agency (Sida)]. *BRIDGE Report No 53*. Brighton, UK: BRIDGE (development - gender), Institute of Development Studies, University of Sussex. Diakses dari <http://www.bridge.ids.ac.uk/sites/bridge.ids.ac.uk/files/reports/re53.pdf>. Tanggal akses 1 Maret 2012.
- [44] Pusdatinaker. (2012). *Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan. Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Diakses dari <http://web.archive.org/web/20100219052523/http://pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id/> dan <http://archive.is/http://pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id/katalog/download.php?g=4&c=26>. Tanggal akses 6 April 2012.
- [45] Prasetyia, F., Wulandari, F., & Hutama, R. S. (2011). Pengeluaran Sektor Publik, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, XI(2), 99–116.
- [46] Romer, P. M. (1986). Increasing Returns and Long-run Growth. *Journal of Political Economy*, 94(5), 1002–1037.
- [47] Romer, P. M. (1990). Endogenous Technological Change. *Journal of Political Economy*, 98(5), S71–S102.
- [48] Romer, P. M. (1994). The Origins of Endogenous Growth.

- Journal of economic perspectives*, 8(1), 3–22.
- [49] Schultz, T. W. (1960). Capital Formation by Education. *Journal of Political Economy*, 68(6), 571–583.
- [50] Schultz, T. W. (1961). Investment in Human Capital. *The American Economic Review*, 51(1), 1–17.
- [51] Spence, M. (1973). Job Market Signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355–374.
- [52] Stiglitz, JE. 1973. The Theory of "Screening," Education, and the Distribution of Income. *Cowles Foundation Discussion Paper No. 354*. Connecticut: Cowles Foundation for Research in Economics. Yale University. Diakses dari <http://cowles.yale.edu/sites/default/files/files/pub/d03/d0354.pdf>. Tanggal akses 3 April 2012.
- [53] Suwardi, A. (2011). Pengeluaran Pemerintah Daerah, Produktivitas Pertanian, dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 12(1), 39–55.
- [54] Tilak, J. B. G. (1989). Education and Its Relation to Economic Growth, Poverty, and Income Distribution: Past Evidence and Further Analysis. *World Bank Discussion Papers WDP-46*. Washington, DC: World Bank. Diakses dari <http://documents.worldbank.org/curated/en/357751468739481512/pdf/multi-page.pdf>. Tanggal akses 28 Februari 2012.
- [55] Tilak, J. B. G. (2005). Post-Elementary Education, Poverty and Development in India. *Post-Basic Education and Training Working Paper Series No 6 (Revised)*. United Kingdom: Centre of African Studies. School of Social and Political Science. University of Edinburgh. Diakses dari https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08c5b40f0b64974001174/Tilak_India_PBET_WP6_final_.pdf. Tanggal akses 28 Februari 2012.
- [56] Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi* (Edisi ke-9, Jilid 1). Jakarta: Erlangga.
- [57] UNESCO. (2000). *The Dakar Framework for Action: Education for All: Meeting Our Collective Commitments*. Adopted by the World Education Forum Dakar, Senegal, 26–28 April 2000. France: United Nations on Educational, Scientific and Cultural Organization. Diakses dari <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147e.pdf>. Tanggal akses 1 Maret 2012.
- [58] UNESCO. (2001). *International Workshop on Education and Poverty Eradication Kampala*. Uganda, 30 July to 3 August 2001. Uganda: United Nations on Educational, Scientific and Cultural Organization. Diakses dari <http://www.unesco.org/education/poverty/news.shtml>. Tanggal akses 1 Maret 2012.
- [59] Wedgwood, R. (2007). Education and Poverty Reduction in Tanzania. *International Journal of Educational Development*, 27(4), 383–396.
- [60] Weiss, A. (1995). Human Capital vs. Signalling Explanations of Wages. *The Journal of Economic Perspectives*, 9(4), 133–154.
- [61] World Bank. (1995). *Priorities and Strategies for Education: A World Bank Review*. Washington, DC: The International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank. Diakses dari <http://documents.worldbank.org/curated/en/117381468331890337/pdf/multi-page.pdf>. Tanggal akses 1 Maret 2012.